



**DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN  
(DPA)**

---

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2026**



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.  
b. NIP : 198305252006041016  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

**ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.**  
NIP: 196705261997031005

Benteng, Tanggal 12 Januari 2026  
Disahkan oleh,  
PPKD

**NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.**  
NIP: 198305252006041016



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.02 - KEUANGAN  
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

a. Nama : NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.  
b. NIP : 198305252006041016  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.  
NIP: 198305252006041016

Benteng, Tanggal 12 Januari 2026  
Pengguna Anggaran

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.  
NIP: 198305252006041016



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812 Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 900/76/I/2026/BPKPD**

**TENTANG**

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);

28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 887).
29. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan      | : Rp795.581.192.000,00 |
| 2. Belanja Operasi | : Rp 11.109.989.288,95 |
| 3. Belanja Modal   | : Rp 24.163.000,00     |
| 4. Total Belanja   | : Rp114.980.983.423,00 |
| 5. Pembiayaan      | : Rp 1.000.000.000,00  |

**KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 12 Januari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
KEPALA BADAN,**

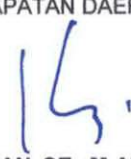



**NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si**

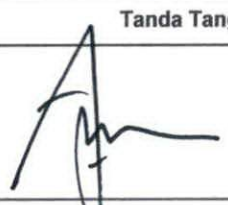
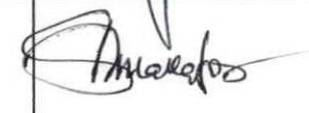

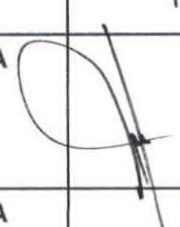

Pangkat : Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPA-SKPD 4
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026			
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp47.551.155.000,00</b>
4	1	01 Pajak Daerah	Rp22.525.655.000,00
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp247.000.000,00
4	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp12.778.500.000,00
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	Rp12.000.000.000,00
4	2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp748.030.037.000,00</b>
4	2	01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp725.580.037.000,00
4	2	02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp22.450.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>			<b>Rp795.581.192.000,00</b>
5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp11.109.989.288,95</b>
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp6.750.720.999,95
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp4.359.268.289,00
5	2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp24.163.000,00</b>
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp24.163.000,00
5	3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp6.415.000.000,00</b>
5	3	01 Belanja Tidak Terduga	Rp6.415.000.000,00
5	4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp97.431.831.135,00</b>
5	4	01 Belanja Bagi Hasil	Rp2.578.880.000,00
5	4	02 Belanja Bantuan Keuangan	Rp94.852.951.135,00
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>Rp114.980.983.423,95</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>			<b>Rp680.600.208.576,05</b>
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>Rp0,00</b>
6	2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp1.000.000.000,00</b>
6	2	02 Penyertaan Modal Daerah	Rp1.000.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>Rp1.000.000.000,00</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>			<b>Rp1.000.000.000,00</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		<p>Benteng, Tanggal 12 Januari 2026</p> <p>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p></p> <p><b>NURSAL IKHSAN, SE., M.Ak., M.Si</b> NIP. 198305252006041016</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p></p> <p><b>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</b> NIP. 198305252006041016</p>
Januari	Rp795.581.192.000,00	Januari	Rp115.980.983.423,95	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00	
April	Rp0,00	April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp795.581.192.000,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp115.980.983.423, 5</b>	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI MUH. AWALUDDIN, S.A.P.	19791213 200604 1 014	KOORDINATOR	
2.	M. SYUKRI SALLATU, S.T.	19720204 200604 1 017	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.	19810925 201001 1 014	ANGGOTA	
4.	NUR AHMAD AFANDI, S.M.	19871218 201903 1 005	ANGGOTA	
5.	MANDALA PUTRA, S.Kel.	19800616 200604 1 026	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD
KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				<b>Rp795.581.192.000,00</b>
4	PENDAPATAN DAERAH				<b>Rp795.581.192.000,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				<b>Rp47.551.155.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah				<b>Rp22.525.655.000,00</b>
4.1.01.09	Pajak Reklame				<b>Rp275.000.000,00</b>
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				<b>Rp275.000.000,00</b>
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				<b>Rp275.000.000,00</b>
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	::: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1	Tahun	1 Tahun	Rp275.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				<b>Rp21.000.000,00</b>
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah				<b>Rp21.000.000,00</b>
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah				<b>Rp21.000.000,00</b>
	:: Pajak Air Tanah				
	::: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp21.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				<b>Rp5.000.000,00</b>
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet				<b>Rp5.000.000,00</b>
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet				<b>Rp5.000.000,00</b>
	:: Pajak Sarang Burung Walet				
	::: Pajak Sarang Burung Walet				
	Pajak Sarang Burung Walet	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				<b>Rp5.177.000.000,00</b>
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				<b>Rp5.177.000.000,00</b>
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				<b>Rp5.177.000.000,00</b>
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.177.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				<b>Rp4.052.316.400,00</b>
4.1.01.15.001	PBBP2				<b>Rp4.052.316.400,00</b>
4.1.01.15.001.00001	PBBP2				<b>Rp4.052.316.400,00</b>
	:: PBBP2				
	::: PBBP2				
	PBBP2	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.052.316.400,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				<b>Rp830.000.000,00</b>
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru				<b>Rp830.000.000,00</b>
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru				<b>Rp830.000.000,00</b>
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	::: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1	Tahun	1 Tahun	Rp830.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				<b>Rp7.766.898.000,00</b>
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman				<b>Rp3.300.000.000,00</b>
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran				<b>Rp3.300.000.000,00</b>
	:: PBJT-Restoran				
	::: PBJT-Restoran				
	PBJT-Restoran	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.300.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik				<b>Rp4.200.000.000,00</b>
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				<b>Rp4.200.000.000,00</b>
	:: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				
	::: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan dari Penerangan Jalan				
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.200.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan				<b>Rp215.000.000,00</b>
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel				<b>Rp215.000.000,00</b>
	:: PBJT-Hotel				
	::: PBJT-Hotel				
	PBJT-Hotel	1	Tahun	1 Tahun	Rp215.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir				<b>Rp25.000.000,00</b>
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir				<b>Rp25.000.000,00</b>
	:: PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir				
	::: PBJT JASA PARKIR				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000,00
<b>4.1.01.19.005</b>	<b>PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan</b>				<b>Rp26.898.000,00</b>
<b>4.1.01.19.005.00002</b>	<b>PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana</b>				<b>Rp26.898.000,00</b>
	:: PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana				
	::: PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana				
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1	Tahun	1 Tahun	Rp26.898.000,00
<b>4.1.01.20</b>	<b>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>				<b>Rp2.411.718.700,00</b>
<b>4.1.01.20.001</b>	<b>Opsen PKB</b>				<b>Rp2.411.718.700,00</b>
<b>4.1.01.20.001.00001</b>	<b>Opsen PKB</b>				<b>Rp2.411.718.700,00</b>
	:: Opsen PKB				
	::: Opsen PKB				
	Opsen PKB	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.411.718.700,00
<b>4.1.01.21</b>	<b>Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>				<b>Rp1.986.721.900,00</b>
<b>4.1.01.21.001</b>	<b>Opsen BBNKB</b>				<b>Rp1.986.721.900,00</b>
<b>4.1.01.21.001.00001</b>	<b>Opsen BBNKB</b>				<b>Rp1.986.721.900,00</b>
	:: Opsen BBNKB				
	::: Opsen BBNKB				
	Opsen BBNKB	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.986.721.900,00
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>				<b>Rp247.000.000,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				<b>Rp247.000.000,00</b>
<b>4.1.02.02.001</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>				<b>Rp182.000.000,00</b>
<b>4.1.02.02.001.00002</b>	<b>Retribusi Penyewaan Tanah</b>				<b>Rp92.000.000,00</b>
	:: Retribusi Penyewaan Tanah				
	::: Retribusi Penyewaan Tanah				
	Retribusi Penyewaan Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp92.000.000,00
<b>4.1.02.02.001.00003</b>	<b>Retribusi Penyewaan Bangunan</b>				<b>Rp90.000.000,00</b>
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp90.000.000,00
<b>4.1.02.02.006</b>	<b>Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>				<b>Rp65.000.000,00</b>
<b>4.1.02.02.006.00001</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>				<b>Rp65.000.000,00</b>
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1	Tahun	1 Tahun	Rp65.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				<b>Rp12.778.500.000,00</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				<b>Rp12.778.500.000,00</b>
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				<b>Rp12.658.500.000,00</b>
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				<b>Rp12.658.500.000,00</b>
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
	::: BANK SULSELBAR				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.948.000.000,00
	::: BPR PESISIR TANADOANG				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp710.500.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				<b>Rp120.000.000,00</b>
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				<b>Rp120.000.000,00</b>
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				
	::: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1	Tahun	1 Tahun	Rp120.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				<b>Rp12.000.000.000,00</b>
4.1.04.05	Jasa Giro				<b>Rp500.000.000,00</b>
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah				<b>Rp500.000.000,00</b>
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah				<b>Rp500.000.000,00</b>
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	::: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				<b>Rp500.000.000,00</b>
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				<b>Rp500.000.000,00</b>
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				<b>Rp500.000.000,00</b>
	:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	<b>::: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				<b>Rp11.000.000.000,00</b>
4.1.04.09.001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				<b>Rp11.000.000.000,00</b>
4.1.04.09.001.00001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				<b>Rp11.000.000.000,00</b>
	<b>:: Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>				
	<b>::: Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>				
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.000.000.000,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				<b>Rp748.030.037.000,00</b>
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>				<b>Rp725.580.037.000,00</b>
4.2.01.05	<b>Dana Desa</b>				<b>Rp55.278.286.000,00</b>
4.2.01.05.001	<b>Dana Desa</b>				<b>Rp55.278.286.000,00</b>
4.2.01.05.001.00001	<b>Dana Desa</b>				<b>Rp55.278.286.000,00</b>
	<b>:: Dana Desa</b>				
	<b>::: Dana Desa</b>				
	Dana Desa	1	Tahun	1 Tahun	Rp55.278.286.000,00
4.2.01.06	<b>Insentif Fiskal</b>				<b>Rp0,00</b>
4.2.01.06.003	<b>Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan</b>				<b>Rp0,00</b>
4.2.01.06.003.00001	<b>Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan</b>				
	<b>::: Dana Insentif Fiskal</b>				
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
4.2.01.07	<b>Dana Bagi Hasil (DBH)</b>				<b>Rp5.128.284.000,00</b>
4.2.01.07.001	<b>DBH Pajak</b>				<b>Rp2.491.654.000,00</b>
4.2.01.07.001.00001	<b>DBH PBB</b>				<b>Rp350.332.000,00</b>
	<b>:: DBH PBB</b>				
	<b>::: DBH Pajak Bumi dan Bangunan</b>				
	DBH PBB	1	Tahun	1 Tahun	Rp350.332.000,00
4.2.01.07.001.00002	<b>DBH PPh Pasal 21</b>				<b>Rp2.141.322.000,00</b>
	<b>:: DBH PPh Pasal 21</b>				
	<b>::: DBH PPh Pasal 21</b>				
	DBH PPh Pasal 21	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.141.322.000,00
4.2.01.07.002	<b>DBH Sumber Daya Alam (SDA)</b>				<b>Rp2.636.630.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi				<b>Rp333.131.000,00</b>
	:: DBH SDA Minyak Bumi				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				
	DBH SDA Minyak Bumi	1	Tahun	1 Tahun	Rp333.131.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent				<b>Rp642.980.000,00</b>
	:: DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1	Tahun	1 Tahun	Rp642.980.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				<b>Rp19.782.000,00</b>
	:: DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	::: Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1	Tahun	1 Tahun	Rp19.782.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan				<b>Rp1.640.737.000,00</b>
	:: DBH SDA Perikanan				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH SDA Perikanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.640.737.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)				<b>Rp514.467.968.000,00</b>
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya				<b>Rp492.982.723.000,00</b>
4.2.01.08.001.00001	DAU				<b>Rp492.982.723.000,00</b>
	:: DAU				
	::: DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA				
	DAU	1	Tahun	1 Tahun	Rp492.982.723.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya				<b>Rp21.485.245.000,00</b>
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				<b>Rp1.400.000.000,00</b>
	:: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				
	::: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				<b>Rp0,00</b>
	:: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	::: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				<b>Rp7.640.986.000,00</b>
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	<b>::: DAU BIDANG PENDIDIKAN</b>				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.640.986.000,00
<b>4.2.01.08.002.00005</b>	<b>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan</b>				<b>Rp12.444.259.000,00</b>
	<b>:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan</b>				
	<b>::: DAU BIDANG KESEHATAN</b>				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp12.444.259.000,00
<b>4.2.01.08.002.00006</b>	<b>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum</b>				
	<b>::: DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>				<b>Rp150.705.499.000,00</b>
<b>4.2.01.09.001</b>	<b>DAK Fisik</b>				<b>Rp4.700.581.000,00</b>
<b>4.2.01.09.001.00001</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD</b>				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09.001.00002</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD</b>				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09.001.00003</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SM</b>				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09.001.00006</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB</b>				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09.001.00034</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan</b>				<b>Rp0,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan</b>				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
<b>4.2.01.09.001.00040</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler</b>				<b>Rp1.949.568.000,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler</b>				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler</b>				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.949.568.000,00
<b>4.2.01.09.001.00075</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan</b>				<b>Rp2.751.013.000,00</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan</b>				
	<b>::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan</b>				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.751.013.000,00
<b>4.2.01.09.002</b>	<b>DAK Non Fisik</b>				<b>Rp146.004.918.000,00</b>
<b>4.2.01.09.002.00001</b>	<b>DAK Non Fisik-BOS Reguler</b>				<b>Rp20.500.800.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOS Reguler</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-BOS Reguler</b>				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp20.500.800.000,00
<b>4.2.01.09.002.00002</b>	<b>DAK Non Fisik-BOS Afirmasi</b>				<b>Rp1.332.500.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOS Afirmasi</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-BOS Afirmasi</b>				
	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.332.500.000,00
<b>4.2.01.09.002.00003</b>	<b>DAK Non Fisik-BOS Kinerja</b>				<b>Rp547.500.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-BOS Kinerja</b>				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1	Tahun	1 Tahun	Rp547.500.000,00
<b>4.2.01.09.002.00004</b>	<b>DAK Non Fisik-TPG PNSD</b>				<b>Rp77.454.243.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-TPG PNSD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-TPG PNSD</b>				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp77.454.243.000,00
<b>4.2.01.09.002.00005</b>	<b>DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD</b>				<b>Rp45.000.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD</b>				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp45.000.000,00
<b>4.2.01.09.002.00006</b>	<b>DAK Non Fisik-TKG PNSD</b>				<b>Rp11.335.587.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-TKG PNSD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-TKG PNSD</b>				
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.335.587.000,00
<b>4.2.01.09.002.00007</b>	<b>DAK Non Fisik-BOP PAUD</b>				<b>Rp3.169.950.000,00</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOP PAUD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-BOP PAUD</b>				


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.169.950.000,00
<b>4.2.01.09.002.00008</b>	<b>DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan</b>				<b>Rp4.192.020.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	::: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.192.020.000,00
<b>4.2.01.09.002.00009</b>	<b>DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum</b>				<b>Rp600.000.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
	::: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1	Tahun	1 Tahun	Rp600.000.000,00
<b>4.2.01.09.002.00012</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan</b>				<b>Rp352.632.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp352.632.000,00
<b>4.2.01.09.002.00021</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKB-KB</b>				<b>Rp1.239.430.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-BOKB-KB				
	::: DAK Non Fisik-BOKB-KB				
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.239.430.000,00
<b>4.2.01.09.002.00033</b>	<b>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota</b>				<b>Rp14.619.933.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				
	::: DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.056.909.000,00
	::: Tunjangan Khusus Dokter				
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.563.024.000,00
<b>4.2.01.09.002.00035</b>	<b>DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas</b>				<b>Rp10.615.323.000,00</b>
	:: DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				
	::: DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.615.323.000,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				<b>Rp22.450.000.000,00</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>				<b>Rp22.450.000.000,00</b>
<b>4.2.02.01.001</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>				<b>Rp22.450.000.000,00</b>
<b>4.2.02.01.001.00003</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>				<b>Rp10.000.000.000,00</b>
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				<b>Rp12.450.000.000,00</b>
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1	Tahun	1 Tahun	Rp12.450.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				<b>Rp0,00</b>
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				<b>Rp0,00</b>
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				<b>Rp0,00</b>
	:: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	::: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00
				Jumlah	<b>Rp795.581.192.000,00</b>
				Jumlah	<b>Rp795.581.192.000,00</b>


Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp795.581.192.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp795.581.192.000,00</b>


Benteng, Tanggal 12 Januari 2026



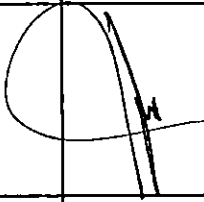

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH

  
NURSAL IKHSAN, SE., M.Ak., M.Si  
NIP. 198305252006041016

Mengesahkan,  
PPKD

  
NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si  
NIP. 198305252006041016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDI MUH. AWALUDDIN, S.A.P.	19791213 200604 1 014	KOORDINATOR	

2.	M. SYUKRI SALLATU, S.T.	19720204 200604 1 017	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E.	19810925 201001 1 014	ANGGOTA	
4.	NUR AHMAD AFANDI, S.M.	19871218 201903 1 005	ANGGOTA	
5.	MANDALA PUTRA, S.Kel.	19800616 200604 1 026	ANGGOTA	

\*) Sesuai periodisasi SPD